

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Konsep Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial sebagai ilmu dan disiplin akademis merujuk pada kaitannya dengan ilmu kesejahteraan sosial untuk mengembangkan pemikiran, strategi, dan teknik untuk meningkatkan kesejahteraan suatu masyarakat. Ilmu Kesejahteraan sosial merupakan tentang mempelajari lembaga, program, dan kebijakan yang memfokuskan pelayanan sosial pada individu, kelompok, dan masyarakat. Berbagai masalah sosial terjadi di dalam diri manusia dan lingkungannya. Kesejahteraan sosial adalah ilmu pengetahuan yang berfokus memecahkan masalah sosial bertujuan untuk memulihkan keberfungsian seseorang secara sosial.

2.1.1. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial berasal dari kata “Sejahtera”, dari bahasa sansekerta “*Catera*” yang berarti orang yang sejahtera yang hidupnya aman tentram baik lahir maupun batin. Sosial berasal dari “*Socius*” artinya kawan, teman, dan kerja sama dimana orang yang sosial dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial merupakan dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik. Kesejahteraan sosial yang dikutip dari Friedlander (1980) menurut Fahrudin (2014:9), sebagai berikut:

Kesejahteraan sosial merupakan sistem terorganisasi dari pelayanan pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi

-relasi *personal* dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan kebutuhan keluarga dan masyarakat.

Definisi di atas bermakna bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu sistem dalam organisasi dalam suatu pelayanan dan lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan individu, kelompok maupun masyarakat dengan bertujuan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dengan cara meningkatkan kemampuan individu dan kelompok baik dalam memecahkan masalahnya maupun dalam memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, dan jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang tidak layak, maka mereka mengalami masalah sosial.

Pengertian kesejahteraan sosial adalah kegiatan yang terorganisir dengan suatu ilmu pengetahuan, yang berusaha mengkaji metodologi dari aspek strategi dan teknis untuk menyelesaikan masalah sosial yang dialami individu, kelompok, maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kepentingan keluarga dan masyarakat. Adapun pengertian kesejahteraan sosial menurut Suharto (2014:1) kesejahteraan sosial yaitu:

Suatu institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan aktivitas terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga Pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat.

Definisi diatas mengatakan bahwa kesejahteraan sosial adalah kegiatan melibatkan beberapa profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan pelayanan sosial yang dilakukan oleh lembaga pemerintah maupun swasta bertujuan untuk

membantu dan mengatasi masalah sosial dengan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

2.1.2. Tujuan Dan Fungsi Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial memiliki tujuan dan fungsi tersebut diharapkan dapat memberikan solusi atau pemecahan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Menurut Adi Fahrudin (2014:10) kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber sumber peningkatan dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan kesejahteraan sosial dimana masyarakat dapat mencapai kehidupan pokok yang baik dalam pangan, sandang kesehatan, perumahan, pendidikan dan hubungan-hubungan sosial yang baik di lingkungannya. serta menyesuaikan diri terhadap taraf hidup yang memuaskan dengan lingkungan masyarakat tersebut. Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi yaitu terpenuhinya kebutuhan masyarakat untuk tercapainya kehidupan yang layak untuk memberdayakan masyarakat, membangun masyarakat, perlindungan sosial, dan untuk meningkatkan pembangunan sosial. Fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut Friedlander & Apte (1982) yang dikutip Fahrudin (2014: 12) adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Pencegahan (*Preventive*)
Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru.
2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)
Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat.
3. Fungsi Pengembangan (*Development*)
Kesejahteraan sosial berfungsi memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.
4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)
Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

Berdasarkan fungsi-fungsi kesejahteraan sosial di atas, memiliki empat fungsi meliputi fungsi pencegahan, penyembuhan, pengembangan, penunjang bagi kehidupan masyarakat sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat itu sendiri. Pada fungsi pencegahan tujuan untuk menghindari timbulnya masalah sosial dalam suatu masyarakat. Fungsi penyembuhan untuk memecahkan masalah sosial dan menghilangkan dampak dari masalah yang dihadapi. Sedangkan fungsi pengembangan dilakukan untuk mengembangkan sumber-sumber yang ada di masyarakat dengan pemberdayaan. Jika suatu saat terjadi masalah maka sumber-sumber tersebut dapat digunakan sebagai upaya untuk mengatasinya. Sementara yang terakhir yaitu fungsi penunjang membantu dalam meningkatkan bidang kesejahteraan sosial lainnya.

2.1.3. Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan kesejahteraan sosial ini adalah hal yang penting bagi praktik kesejahteraan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada. Menurut Midgley (2005:24) dalam Fahrudin (2014:51) pendekatan-pendekatan kesejahteraan sosial antara lain:

1. Filantropi sosial

Filantropi upaya kesejahteraan sosial yang dilakukan melawan yang bersifat amal (*charity*) dengan menyumbangkan waktu, uang, dan tenaganya untuk menolong orang lain.

2. Pekerjaan sosial

Pendekatan yang teroganisir untuk kesejahteraan sosial dengan menggunakan tenaga profesional yang memenuhi syarat untuk menangani masalah sosial. Pekerjaan sosial sendiri juga tidak jauh dari adanya filantropi. Pada abad ke-19 pekerjaan sosial telah mengalami pengembangan profesional cukup pesat menyebar di seluruh dunia.

3. Administrasi sosial

Menciptakan berbagai macam program sosial Pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan warga negaranya, biasanya dengan penyediaan pelayanan sosial. Pendekatan ini dilakukan langsung oleh Pemerintah.

4. Pembangunan sosial

Proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara utuh, di mana pembangunan ini dilakukan untuk melengkapi dinamika proses pembangunan ekonomi.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pendekatan kesejahteraan sosial terdiri dari filantropi sosial, pekerjaan sosial, adminitrasi sosial dan pembangunan sosial. Filantropi yang bersifat amal berbasis keagamaan dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Sementara pekerjaan sosial dilakukan secara profesional yang dilakukan seseorang yang memiliki gelar sebagai pekerja

sosial. Sedangkan administrasi sosial dikenal dengan pemberian program atau pelayanan sosial dari Pemerintah untuk masyarakatnya. Adapun pendekatan pembangunan sosial erat kaitannya dengan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial disini harus terencana karena bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2.2. Tinjauan Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan suatu ilmu yang memfokuskan intervensinya pada proses interaksi antara manusia (*people*) dengan lingkungannya, dan mengutamakan teori-teori perilaku manusia dan sistem sosial guna meningkatkan taraf hidup (*human well-being*) masyarakat dan perilaku serta teori-teori tersebut berkaitan dengan sistem sosial memainkan peranan penting. Karena pekerjaan sosial sendiri yaitu profesi pertolongan yang profesional untuk memfokuskan kepada kegiatan pemberian pelayanan sosial agar individu, kelompok dan masyarakat mampu menjalankan keberfungsial sosialnya atau fungsi sosialnya dengan baik.

2.2.1. Pengertian Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial merupakan profesi profesional dalam melayani masyarakat dalam menangani masalah-masalah sosial dengan tujuan untuk meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, masyarakat. Adapun pekerjaan sosial menurut Zastrow (1999) dalam Huraerah (2011:38), yaitu “Pekerjaan sosial adalah aktifitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas

mereka agar berfungsi sosial dan menciptakan kondisi kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan atau dapat mencapai apa yang diharapkannya”.

Definisi diatas disimpulkan bahwa pekerjaan sosial untuk membantu dari masalah sosial yang dihadapi individu atau kelompok maupun masyarakat untuk meningkatkan dan memperbaiki kapasitas mereka agar dapat berfungsi secara sosial agar dapat menjalankan fungsi dan tugas hidupnya di dalam lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Menurut Asosiasi nasional pekerjaan sosial amerika serikat (NASW) dalam Fahrudin (2014:60) sebagai berikut:

Social work is the professional activity of helping individuals, groups, or create societal condicions favorable to their golas. Social work practice consists of the professional aplication of social work values, principles, and techniques to on or more of the following ends: helping people obtain tangible services: providing counseling and psychoterapy for individuals, families, and groups; helping communities or groups provide or improve social and health services; and participatting in relecvans legislatitive processes.

(Pekerjaan sosial adalah aktivitas professional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas untuk meningkatkan atau memulihkan kapasitas keberfungsian sosial mereka dan untuk menciptakan kondisi yang mendukung tujuan-tujuan itu. Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan teknik-teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut: membantu orang memperoleh pelayanan-pelayanan nyata, memberikan konseling dan psikoterapi kepada individu-individu, keluarga-keluarga, kelompok kelompok, membantu komunitas atau kelompok memberikan pelayanan pelayanan sosial dan kesehatan, dan berpartisipasi dalam proses-proses legislatif yang berkaitan dengan kesejahteraan).

Penjelasan di atas menjabarkan bahwa pekerjaan sosial secara profesional berfokus pada proses pertolongan yang dilakukan kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Pertolongan ini diberikan kepada mereka yang memang memiliki keberfungsian sosial yang tidak berjalan dengan baik. Pekerjaan sosial memberikan pelayanan-pelayanan bagi individu atau kelompok tersebut dalam mewujudkan aspirasi mereka dalam memulihkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan komunitas. Keberfungsian sosial merupakan sebagai berjalan atau tidaknya peran seseorang di dalam masyarakat. Pengertian keberfungsian sosial menurut Suharto dkk (2014:28) yaitu “Keberfungsian sosial sebagai kemampuan orang (individu, keluarga, kelompok, atau masyarakat) dan sistem sosial (lembaga dan jaringan sosial) dalam memenuhi/merespon kebutuhan dasar, menjalankan peranan sosial, serta menghadapi goncangan dan tekanan (*shock and stresses*)”

Definisi di atas bahwa keberfungsian sosial erat kaitannya seseorang yang berfungsi secara sosial tentunya mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya dengan usaha dalam mencapai kebutuhan tersebut. Selain dapat berfungsi sosial di masyarakat, individu, kelompok, maupun masyarakat dalam menjalankan peranan sosial di masyarakat dan menghadapi tekanan masalah sosial.

2.2.2. Fokus Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial adalah sebagai proses bantuan atau pertolongan yang memiliki peranan yang disesuaikan dengan kondisi mulai dari proses awal hingga selesai. Peranan pekerja sosial yaitu sebagai fasilitator, mediator, broker, pembimbing, perencana, pemecah masalah, dan evaluator. Peranan tersebut

bertujuan awal pekerjaan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial dan menjalankan peranan sosialnya yang dapat dilihat dari strategi dalam pekerjaan sosial menurut Dubois dan Miley dalam Suharto (2009:5) sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan orang dalam menghadapi masalah yang dialaminya.
2. Menghubungkan orang dengan sistem dan jaringan sosial yang memungkinkan mereka menjangkau dan memperoleh berbagai sumber pelayanan dan kesempatan.
3. Meningkatkan kinerja lembaga- lembaga sosial sehingga mampu memberikan pelayanan sosial secara efektif, berkualitas, dan berkeprimanusiaan.
4. Merumuskan dan mengembangkan perangkat hukum dan peraturan yang mampu menciptakan situasi yang kondusif bagi tercapainya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial.

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa pekerja sosial harus membangun kemampuan klien untuk bisa memecahkan masalah yang dihadapi, pekerja sosial membantu menghubungkan klien ke pelayanan sosial lembaga untuk diberikan pemecahan masalahnya, pekerja sosial menyampaikan masukan kepada pelayanan sosial lembaga untuk memperbaiki keefektifan pelayanan tersebut, serta pekerja sosial membantu mengembangkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan sosial, baik itu kebijakan Pemerintah dan kebijakan pelayanan lembaga. Fokus utama dari pekerja sosial yaitu untuk mengembalikan keberfungsian sosial klien dengan melakukan beberapa proses yang memiliki tujuan dan strategi.

2.2.3. Fungsi-Fungsi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial terdapat beberapa fungsi bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan juga memecahkan masalah sosial yang ada di masyarakat dan berusaha memberikan pelayanan secara profesional guna

membantu individu untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Penunjang terhadap fungsi pekerjaan sosial menurut Pujileksono, dkk (2018:20) membagi menjadi delapan bagian sebagai berikut:

1. Mengembangkan, mempertahankan dan memperkuat sistem kesejahteraan sosial sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia.
2. Menjamin dengan memadainya standar kehidupan yang layak bagi semua orang.
3. Meningkatkan kemampuan orang untuk melaksanakan fungsinya secara optimal
4. Mendorong dan meningkatkan kemampuan tatanan sosial dan struktur intutisional masyarakat.
5. Membantu mengembangkan pelayanan institusi sosial.
6. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial
7. Mengimplementasikan standarisasi adaptasi sosial dan perubahan yang terukur sehingga tercipta stabilitas sosial,
8. Mengendalikan penyimpangan perilaku dan disorganisasi sosial.

Berdasarkan kutipan di atas bahwa fungsi pekerjaan sosial adalah berfokus pada kebutuhan-kebutuhan dasar, menjamin standar kehidupan yang layak, melaksanakan fungsinya secara optimal, meningkatkan tatanan sosial, mengembangkan pelayanan institusi sosial, penerapan standarisasi adaptasi sosial sehingga tercipta stabilitas sosial, mencegah konflik sosial dan masalah sosial serta pengendalian penyimpangan perilaku. Fungsi pekerja sosial tersebut di dalam melakukan praktik pertolongan kepada individu, keluarga maupun masyarakat yang mengalami masalah serta meningkatkan keberfungsian sosial individu, keluarga dan masyarakat.

2.2.4. Prinsip-prinsip Pekerjaan Sosial

Pekerja sosial juga mempunyai prinsip-prinsip sebagai proses yang tentunya profesional. Prinsip-prinsip ini diterapkan oleh pekerja sosial dengan tujuan untuk membentuk relasi yang baik dengan klien. Adapun enam prinsip dasar dalam praktek pekerjaan sosial menurut Mans dalam Fahrudin (2014: 16-19) yaitu:

- a. **Penerimaan**
Pekerja sosial yang menerima klien tanpa menghakimi klien tersebut sebelum, pekerja sosial untuk menerima klien dengan sewajarnya akan lebih membantu relasi antara pekerja sosial dengan kliennya. Dengan adanya sikap menerima klien apa adanya maka klien akan dapat lebih percaya diri klien dapat mengungkapkan berbagai macam perasaan dan mengganjal di dalam pembicaraan.
- b. **Komunikasi**
Prinsip komunikasi dengan klien, baik dalam bentuk komunikasi yang verbal, yang meminta klien melalui sistem klien, maupun bentuk komunikasi nonverbal, seperti cara membuka klien, memilih cara duduk, duduk dalam suatu pertemuan dengan anggota keluarga yang lain.
- c. **Individualisasi**
Setiap individu yang berbeda satu sama lain, sehingga seorang pekerja sosial haruslah mengatur cara memberi kliennya, guna mendapatkan hasil yang diinginkan disebut prinsip individualisasi.
- d. **Partisipasi**
Berdasarkan prinsip partisipasi, seorang pekerja sosial harus meminta kliennya untuk mendorong aktif dalam upaya memecahkan masalah yang dihadapinya. Maka tanpa ada kerja sama dan peran serta klien maka upaya bantuan sulit untuk mendapatkan hasil yang optimal.
- e. **Kerahasiaan**
Mengungkapkan prinsip kerahasiaan klien apa yang sedang ia rasakan dan bahaya ia hadapi dengan rasa aman, karena ia yakin apa yang ia utarakan dalam hubungan kerja dengan pekerja sosial akan tetap dirahasiakan oleh pekerja sosial agar tidak diketahui oleh orang lain.
- f. **Kesadaran diri pekerja sosial.**
Prinsip kesadaran diri ini menuntut pekerja sosial profesional dengan menjalin relasi dengan kliennya, dalam arti pekerja

sosial yang mampu menggerakkan benar-benar terbawa oleh perasaan atau bantuan yang disampaikan oleh kliennya tidak kaku dalam berbicara dengan pekerja sosial memberi bantuan dengan setiap tanggung jawab terhadap keberhasilan proses.

Definisi di atas tentang prinsip pekerja sosial bertujuan untuk relasi pekerja sosial dengan klien supaya dapat berjalan dengan baik dalam melakukan intervensi kepada klien. Prinsip-prinsip pekerja sosial tersebut ialah prinsip-prinsip penerimaan (*principle of acceptance*), prinsip komunikasi (*principle of communication*), prinsip individualisasi (*principle of individualization*), prinsip partisipasi (*principle of participation*), prinsip kerahasiaan (*principle of confidentiality*). Pembahasan prinsip pekerja sosial di atas lebih erat kaitannya intervensi mikro (level individu, keluarga atau dalam kelompok kecil). Akan tetapi, prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan dalam intervensi makro (level organisasi dan komunitas).

2.2.5. Metode dan Teknik Dalam Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial memiliki metode dan teknik yang digunakan untuk menangani masalah klien. Seorang pekerja sosial harus mempunyai metode praktiknya agar tidak salah dalam memberikan pelayanan kepada klien serta mengetahui apa yang dihadapi oleh klien. Menurut Fahrudin (2017:71) menyatakan bahwa pekerja sosial mempunyai tiga metode dalam membantu klien, yaitu metode pokok tersebut adalah *social case work*, *social group work*, dan *community organization/community development*. Adapun *social casework* (terapi individu dan keluarga) Dikutip dari Wibhawa, Raharjo dan Budiarti (2010:93) yaitu:

Metode *social case work* bersifat individual- karenanya dikatakan pendekatan mikro, yaitu membantu individu-individu yang memiliki masalah, baik yang bersifat *eksternal*, artinya memiliki masalah yang bersumber dari lingkungan sosialnya maupun individu-individu yang mengalami masalah yang bersumber dari dalam dirinya sendiri. Dalam praktiknya, metode *social case work* mempunyai sifat-sifat psikososial.

Penjelasan tersebut menyatakan bahwa *social case work* upaya menangani masalah keberfungsian sosial yang dialami individu dengan melibatkan keluarga untuk melaksanakan sesuai perannya di lingkungan sosial. Hal diatas menjelaskan *social case work* pekerja sosial menggunakan pendekatan mikro dalam profesi pekerjaan sosial yang bersifat penyembuhan (*problem solving*) dan konseling (*therapy*) serta kajian yang bersifat pengembangan diri yang diperuntukkan kepada seorang individu yang dalam kehidupannya mengalami masalah sosial, baik yang berasal dari lingkungan sosial ataupun dari dalam dirinya sendiri yang melibatkan praktiknya yang mempunyai sifat psikososial.

Social Group Work (bimbingan sosial kelompok) adalah suatu pelayanan kepada kelompok kecil tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok sebagai perantara dalam proses pertolongan profesionalnya. Menurut Alisi dalam (Garvin, 2011) menyatakan *groupwork* sebagai:

Social Group Work adalah suatu lembaga pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok dengan tujuan korektif, preventif, memudahkan pertumbuhan dan perkembangan peningkatan kehidupan peningkatan pribadi dan tanggung jawab dan partisipasi warga.

Berdasarkan definisi di atas metode ini digunakan untuk pertolongan individu dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya dengan membantu kelompok dalam mencapai tujuannya dengan korektif memberikan pengalaman terhadap disfungsi pribadi dan sosial, preventif upaya perpecahan individu dan sosial dimana terjadi kemunduran yang membahayakan, memudahkan proses pertumbuhan dan perkembangan normal dalam siklus kehidupan, peningkatan pribadi untuk pencapaian cita-cita dan peningkatan pribadi melalui hubungan antar pribadi yang berarti, serta menanamkan tanggung jawab dan partisipasi warga dengan nilai-nilai demokratis dikalangan kelompok.

Community organization / community development (pengorganisasian dan pengembangan masyarakat) merupakan model intervensi komunitas masyarakat yang lebih luas yang bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keberfungsian sosial masyarakat. Menurut Brokensha dan Hodge dalam Isbandi (2013: 169) mendefinisikan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagai:

A movement design to promote better living for the whole community with the active participation, and, if possible, on the initiative of the community. It includes the whole range of development activities in the district whether these are undertaken by government or unofficial bodies. Community development must make use of the cooperative movement and must be put into effect in the closest association with local government bodies.

(Sebuah desain gerakan untuk mempromosikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh komunitas dengan partisipasi aktif, dan, jika mungkin, atas inisiatif komunitas. Ini mencakup seluruh rangkaian kegiatan pembangunan di kabupaten dilakukan oleh Pemerintah atau badan-badan tidak resmi. Pengembangan masyarakat harus memanfaatkan gerakan kooperatif dan harus diwujudkan dalam hubungan terdekat dengan badan-badan Pemerintah daerah).

Definisi di atas menyatakan bahwa pengorganisasian/pengembangan masyarakat suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif berdasarkan inisiatif masyarakat. Pengembangan masyarakat harus dilakukan melalui gerakan yang kooperatif dan harus berhubungan dengan bentuk badan Pemerintah terdekat. Pekerja sosial juga menggunakan berbagai teknik dalam melakukan intervensi dalam menangani masalah klien. Menurut Iskandar (2013:32), ada enam teknik dalam praktek pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. *Small Talk* (pembicaraan ringan), adalah teknik yang berhubungan dengan percakapan yang tidak langsung. *Small talk* dipergunakan pada saat permulaan kontak antara pekerja sosial dengan klien.
2. *Ventilation* (ventilasi), adalah teknik untuk membawa klien kepada suatu sikap yang diperlukan, mengingat perasaan dan sikap dapat mengurangi keberfungsian orang yang mengalami suatu permasalahan.
3. *Support* (mendukung), adalah teknik pemberian semangat atau dorongan untuk menumbuhkan tingkah laku positif dari klien dengan dukungan terhadap aspek-aspek tertentu seperti kekeliruan.
4. *Reassurance* (kepastian), adalah teknik untuk memberikan suatu jaminan kepada klien bahwa situasi yang ia perjuangkan akan dapat dicapai dan ia mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah-masalahnya.
5. *Confrontation* (konfrontasi), adalah teknik yang dipergunakan pekerja sosial menilai begitu sedikit kemajuan dalam mencapai tujuan kasus, atau bila klien menolak untuk menyadari dan menerima suatu kenyataan.
6. *Conflict* (konflik), adalah tipe stress yang terjadi bila seseorang termotivasi oleh dua atau lebih kebutuhan yang saling bertentangan, karena konflik merupakan himpunan ketidaksepakatan, berlawanan atau beradu, maka pekerja sosial mengetahui cara menggunakan teknik ini.

Uraian di atas bahwa pekerja sosial memiliki beberapa teknik yang terdiri dari *small talk* suatu alat untuk memecahkan (kebekuan), kebiasaan sehingga menimbulkan suatu reaksi untuk melakukan pembicaraan. *Ventilation*, membantu klien menyatakan perasaannya. *Support*, pemberian semangat positif untuk klien dengan dukungan terhadap aspek tertentu seperti internal. *Reassurance*, menghormati atau menghargai kemampuan, perasaan dan pencapaian untuk menumbuhkan kepercayaan klien terhadap pekerja sosial. *confrontation* digunakan dengan cara menciptakan kecemasan dan tekanan-tekanan dalam situasi tertentu dengan maksud menimbulkan motivasi perubahan seperti yang diharapkan. *Conflict* suatu bentuk stress yang terjadi bila seseorang yang saling bertentangan atau berlawanan atau beradu, maka pekerja sosial harus mengetahui cara menggunakan teknik ini. Teknik-teknik tersebut digunakan oleh pekerja sosial dalam ruang lingkup mikro, mezzo, maupun makro.

2.2.6. Tahapan-Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial akan mengadakan serangkaian kegiatan intervensi atau proses pertolongan. Pelaksanaan tahapan-tahapan ini disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial yang diarahkan dengan tujuan mengadakan perubahan dalam sistem tersebut. Siporin dalam Iskandar (2013:65) menyatakan terdapat enam tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

1. Tahap *Engagment, Intake dan Kontrak*
Tahap ini yaitu tahap permulaan pekerjaan sosial bertemu dengan klien. Dalam proses ini terjadi pertukaran informasi mengenai apa yang dibutuhkan klien, dengan demikian terjadilah proses saling mengenal dan tumbuhnya kepercayaan klien kepada pekerja sosial. Dan pada akhirnya dapatlah dibuat suatu kontrak antara pekerja sosial dengan klien.

2. Tahap *Assesment*
Assesment yaitu proses pengungkapan dan pemahaman masalah yang meliputi: bentuk masalah, ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah terdahulu yang pernah dilakukan klien (hasil dan kegagalannya), kondisi keberfungsian klien saat ini dan berdasarkan itu semua maka dapatlah ditetapkan fokus atau akar masalah klien. Dalam tahap *assessment* ini pekerja sosial dapat mempergunakan teknik-teknik wawancara, observasi, dan teknik pengumpulan data lainnya yang dianggap lengkap.
3. Tahap Membuat Perencanaan Intervensi
 Rencana intervensi yaitu proses rasional yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial yang meliputi kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan untuk memecahkan masalah klien. Rencana intervensi disusun dan dirumuskan berdasarkan hasil *assesment* yang telah dilakukan sebelumnya oleh pekerja sosial.
4. Tahap Melaksanakan Program
 Berdasarkan rencana intervensi di atas, selanjutnya pekerja sosial mulai melaksanakan program kegiatan masalah yang telah dibuat oleh pekerja sosial dengan klien. Pelaksanaan pemecahan masalah ini pekerja sosial juga harus melibatkan klien secara aktif dalam setiap tahapan.
5. Tahap Evaluasi
 Pekerja sosial mengevaluasi semua pertolongan yang telah dilakukan untuk melihat tingkat keberhasilan, kegagalan atau hambatan-hambatan yang terjadi. Ada dua aspek yang harus dievaluasi oleh klien, yaitu tujuan hasil dan tujuan proses.
6. Tahap Terminasi (Pemutusan Kegiatan Pertolongan)
 Tahap yang dilakukan bilamana tujuan perolongan dicapai atau bilamana terjadi kegiatan *referral* atau bilamana karena alasan-alasan rasional klien meminta pengakhiran pertolongan atau karena adanya faktor-faktor external yang dihadapi pekerja sosial atau karena lebih baik dialihkan kepada lembaga-lembaga atau tenaga ahli lainnya yang lebih berkompeten.

Definisi diatas yang disampaikan oleh Siporin dalam Iskandar (2013:65) dapat diuraikan bahwa terdapat enam tahapan intervensi pekerjaan sosial di atas yang harus dipahami oleh pekerja sosial. Tahapan-tahapan ini bisa diterapkan pada individu, kelompok, masyarakat. Kemudian dalam menangani permasalahan

klien, pekerja sosial akan mengadakan serangkaian kegiatan intervensi atau proses pertolongan.

2.2.7. Peran-Peran Pekerja Sosial

Peran pekerja sosial dalam menangani masalah, terdapat tiga level yaitu, level mikro (individu) disebut sebagai *casework*, mezzo (keluarga dan kelompok kecil) dikenal metode *groupwork*, dan makro (organisasi atau masyarakat) menggunakan metode *community developmen/ policy analisis*.

Menurut Bradfrod W. Sheafor dan Charles R. Horejsi, sebagaimana dikutip oleh Suharto (2014:155). Mengemukakan beberapa peranan yang dilakukan oleh pekerjaan sosial suatu masyarakat atau badan atau lembaga atau panti sosial akan beragam tergantung pada permasalahan klien antara lain:

1. Peranan Sebagai Perantara (*Broker Roles*)
Peran broker sebagai pekerja sosial menghubungkan antara klien dengan sistem sumber baik bantuan berupa materi ataupun non materi yang ada di suatu badan atau lembaga atau panti sosial baik panti asuhan, panti rehabilitasi dan lain-lainnya. Sebagai perantara pekerja sosial juga harus berupaya untuk mencari suatu jaringan kerja dengan suatu organisasi atau perusahaan yang dapat membantu pelayanan yang dibutuhkan. Disimpulkan dari pernyataan dan penjelasan di atas, *broker* atau penghubung, artinya pekerja sosial menghubungkan individu, kelompok dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan masyarakat.
2. Peranan Sebagai Pemungkin (*Enabler Role*)
Peranan enabler ini adalah peran pekerja sosial yang sering digunakan dalam profesinya karena peran ini menggunakan konsep pemberdayaan dan difokuskan pada kemampuan, keahlian, kapasitas, dan kompetensi klien untuk menolong dirinya sendiri. Pekerja sosial berperan sebagai konselor berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan klien dapat terpenuhi dan terjamin, mengidentifikasi tujuan, memfasilitasi untuk berkomunikasi, serta memberikan peluang untuk pemecahan masalah yang dihadapi.

Penjelasan di atas *enabler* membantu masyarakat agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi. Pekerja sosial harus berusaha untuk memberikan peluang agar kebutuhan dan kepentingan klien dapat terpenuhi dan terjamin.

3. Peranan Sebagai Penghubung (*Mediator Role*),

Mediator adalah bertindak untuk mencari kesepakatan, sebagai penengah dalam perbedaan, konflik antar klien dengan keluarga, konflik antar klien yang satu dengan yang lain, untuk mencapai kesepakatan yang memuaskan dan memperoleh hak-hak yang semestinya.

Definisi di atas menunjukkan bahwa pekerja sosial menjembatani konflik antara dua atau lebih individu dengan memberikan jalan keluar sama-sama diuntungkan.

4. Peranan Sebagai Advokasi (*Advocator Role*),

Tugas utama pekerja sosial dalam menjalankan peranan ini disini berbeda dengan advokat hukum. Advokat hukum dituntun melalui keinginan hukum sesuai dengan hukum pada suatu negara, sedangkan untuk advokat pekerja sosial dibatasi oleh kepentingan yang timbul dari klien atau penerima pelayanan.

Dilihat dari penjelasan di atas seorang pekerja sosial juga berperan sebagai *advocator* atau pembela bagi kliennya, seperti memperjuangkan hak klien untuk mendapatkan kesempatan dan kesetaraan, mewakili klien dalam kepentingan pembuatan keputusan.

5. Peranan Sebagai Perunding (*Conferee Role*)

Pekerja sosial dan klien atau penerima layanan mulai bekerja sama. Peran pekerja sosial ini dilakukan ketika pencarian data, pemberian gambaran pada korban.

Pengertian di atas dapat disimpulkan ketika pekerja sosial dan klien mulai bekerjasama. Ini adalah kolaborasi antara klien dengan pekerja sosial yang menggunakan pendekatan pemecahan masalah.

6. Peranan Pelindung (*Guardian Role*),

Peran pekerja sosial sebagai pelindung (*guardian role*) sering kali dilakukan oleh bidang aparat, akan tetapi pekerja sosial dapat berperan melindungi klien atau penerima pelayanan, juga orang-orang yang beresiko tinggi terhadap kehidupan sosialnya. Melihat dari penjelasan di atas, maka pekerja sosial terhadap masyarakat didukung oleh hukum. Hukum tersebut memberikan legitimasi kepada pekerja sosial untuk menjadi pelindung (*protector*) terhadap orang-orang yang lemah dan rentan.

g. Peranan Sebagai Fasilitasi (*Fasilitator Role*),

Fasilitator pekerja sosial harus memberikan pelayanan yang bervariasi dalam memberikan pelayanannya tergantung pada

kebutuhan serta masalah yang dihadapi klien hal ini bertujuan agar klien tidak merasa tertekan dan jenuh dengan pelayanan yang diberikan apabila pelayanan menarik klien. Peran ini sangat penting untuk membantu meningkatkan keberfungsian klien khususnya yang berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu dalam pemecahan masalah yang dihadapi klien.

Definisi di atas menyatakan bahwa fasilitator yaitu peranan pekerjaan sosial yang mempermudah upaya pencapaian tujuan dengan cara menyediakan atau memberi kesempatan dan memfasilitasi yang diperlukan klien untuk mengatasi masalahnya.

h. Peranan Sebagai Inisiator (*Inisiator Role*)

Peranan yang memberikan perhatian pada masalah atau hal-hal yang berpotensi untuk menjadi masalah.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pekerja sosial memberikan perhatian pada isu-isu. Dengan menyadari lembaga bahwa ada permasalahan yang terjadi di lingkungan mereka.

i. Peranan Sebagai Negosiator (*Negotiator Role*)

Peran Negosiator dilakukan terhadap klien yang mengalami konflik atau permasalahan dan mencari penyelesaiannya dengan kompromi dengan persetujuan dan kesepakatan bersama antar kedua belah pihak. Seorang negosiator berada pada salah satu posisi yang sedang memiliki konflik. Uraian diatas menyatakan bahwa Peranan ini banyak dilakukan pada klien atau penerima pelayanan yang mengalami konflik dan membutuhkan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah. Namun, posisi inisiator hanya berada di salah satu pihak yang berkonflik, berbeda dengan posisi mediator yang harus netral antar kedua belah pihak.

Definisi di atas menjelaskan bahwa pekerja sosial dapat memerankan beberapa perannya sesuai dengan situasi dalam melakukan intervensi terhadap klien. peranan pekerja sosial mempunyai peranan yang bermacam-macam berdasarkan permasalahan yang dihadapi klien, dan tidak semua permasalahan ditangani dengan cara yang sama karena sangat tergantung dari masalah yang dialami oleh klien.

2.2.8. Keberfungsian Sosial

Tujuan utama dari pekerja sosial adalah mengembalikan keberfungsian sosial. Ketika keberfungsian sosial mereka kembali dan membaik, maka mereka dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat menjadi sejahtera. Menurut Siporin (1975) dalam Fahrudin (2012:62) menyatakan bahwa keberfungsian sosial yaitu:

Keberfungsian sosial merujuk pada cara individu-individu atau kolektivitas seperti keluarga, perkumpulan, komunitas, dan sebagainya dalam berperilaku untuk dapat melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Karena maksud orang yang berfungsi secara sosial ialah mereka yang mampu menjalankan peranan-peranan sosial sesuai dengan status yang didapatkan oleh dirinya di masyarakat.

Penjelasan di atas keberfungsian sosial dapat pula diartikan kegiatan-kegiatan untuk pelaksanaan kemampuan individu maupun kolektifitas dalam menjalankan peran sosial dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. Seseorang dikatakan berfungsi sosialnya apabila dapat mengatasi dan menjalankan tuntutan sesuai peran sosialnya di lingkungannya yang merupakan sebagai bagian tugas-tugas kehidupannya. Peranan-peranan individu, kelompok, dan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan kemampuan untuk memecahkan permasalahan sosial yang dialaminya. Menurut Barker, Dubois dan Miley dalam Suharto (2014:146) pengertian keberfungsian sosial sebagai berikut:

Keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan baik dari kemampuan dalam menjalankan kehidupan dasar baik diri maupun keluarga serta berkontribusi positif kepada masyarakat. Keberfungsian sosial ini membantu karena mempertimbangkan kedua karakteristik lingkungan dari orang dan kekuatan dari lingkungan.

Berdasarkan pernyataan di atas, bagaimana seorang pekerjaan sosial harus bisa memperbaiki atau mengembangkan keberfungsian sosial klien dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Konsep ini pada intinya menunjuk pada individu, keluarga atau masyarakat dalam menjalankan peran-peran sosial di lingkungannya. Dikatakan seseorang dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik, jika ia mampu memenuhi kebutuhan. Sebaliknya, jika seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhannya, ia dikatakan tidak berfungsi secara sosial atau mengalami disfungsi sosial.

2.3. Tinjauan Tentang Masalah Sosial

Masalah sosial dalam realitas kehidupan bermasyarakat adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Masalah sosial bisa terjadi karena adanya ketidak sesuaian antara harapan dengan kenyataan. Masalah sosial dapat dinilai sebagai suatu kondisi dan situasi yang tidak menyenangkan atau merugikan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi dari penyandang masalah klien dan juga sisi dari lingkungan sekitar klien. Hal tersebut terjadi karena kondisi yang tidak sesuai seperti yang diharapkan atau bahkan tidak sesuai dengan nilai, norma atau aturan yang berlaku di masyarakat.

2.3.1. Pengertian Masalah Sosial

Masalah sosial sebagai kondisi yang tidak diharapkan selalu mendorong adanya tindakan untuk perubahan dan perbaikan terhadap keadaan tersebut, agar terciptanya suatu kondisi kehidupan yang lebih diharapkan dan kondisi yang

sejahtera. Masalah sosial dapat sangat merugikan, apalagi bagi orang yang tidak dapat mengatasi masalah tersebut. Adapun pengertian masalah sosial menurut Weinberg dalam Soetomo (2013: 7) yaitu “masalah sosial adalah situasi yang dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai oleh warga masyarakat sebagai suatu yang bertentangan dengan norma-norma yang cukup signifikan, sehingga mereka sepakat dibutuhkannya suatu tindakan untuk mengubah situasi tersebut.”

Pengertian di atas bahwa suatu ketidaksesuaian antar nilai-nilai yang dianut oleh warga masyarakat dan menyebabkan masalah baru, atau warga masyarakat melanggar adat-istiadat menimbulkan kerugian bagi banyak orang. Masalah sosial tersebut membutuhkan penanganan khusus dalam hal penyelesaiannya. Unsur di atas bahwa suatu masalah dapat dikatakan sebagai suatu masalah sosial jika gejala tersebut didefinisikan dan diidentifikasi sebagai masalah sosial oleh masyarakat. Menurut (Gillin dan Gillin dikutip oleh Soekanto (2012:312) yaitu “Masalah sosial merupakan suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Sehingga menghambat terpenuhinya keinginan-keinginan pokok warga kelompok sosial tersebut sehingga menyebabkan kepincangan ikatan sosial”

Definisi di atas bahwa suatu masalah sosial suatu kondisi dimana terjadinya ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian antara unsur kebudayaan dan norma-norma di dalam suatu masyarakat. Masalah sosial akan membahayakan dan menghambat anggota kelompok sosial dalam terpenuhinya kebutuhan-

kebutuhan dasarnya serta akan menyebabkan kepincangan ikatan sosial jika keinginan-keinginan pokok masyarakat tidak terpenuhi. Oleh sebab itu, masalah-masalah sosial tak akan mungkin ditelaah tanpa mempertimbangkan ukuran-ukuran masyarakat. Setiap masyarakat mempunyai ukuran berbeda khususnya pada anggapan baik dan buruk akibat dari masalah sosial.

2.3.2. Faktor Penyebab Timbulnya Masalah Kesejahteraan Sosial

Permasalahan sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Penyebab timbulnya masalah sosial cukup beragam. Dijelaskan beberapa faktor penyebab timbulnya kemunculan masalah sosial dibedakan menjadi empat katagori menurut Soekanto (2013:361) yaitu:

1. Faktor ekonomi penyebab masalah sosial terbesar, karena individu atau kelompok perlu mencukupi kebutuhannya. Pemerintah perlu mengatasi kesenjangan ekonomi seperti distribusi dan produksi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
2. Faktor budaya memicu pelanggaran norma, nilai dan kepentingan sosial masyarakat. Kebudayaan yang berbeda bisa menimbulkan permasalahan baru yang ada dalam masyarakat. Kebudayaan bisa berkembang dan berperan dalam kehidupan.
3. Faktor biologis disebabkan karena kondisi kesehatan masyarakat yang menimbulkan masalah sosial.
4. Faktor psikologis dipengaruhi oleh pola pikir individu dan masyarakat. Psikologis berhubungan dengan pemahaman dan sudut pandang seseorang tentang aliran sesat agama atau pemahaman yang tidak sesuai dengan ideologi.

Pengertian di atas faktor penyebab masalah sosial merupakan masalah yang ditengah masyarakat. Masalah yang muncul tersebut memiliki hubungan yang erat dengan nilai atau norma yang berlaku ditengah masyarakat. Masalah tersebut bersifat sosial, sehingga perlu pendengkatan secara sosial yang menyeluruh.

2.3.3. Komponen Masalah Sosial

Masalah sosial terdapat beberapa komponen atau faktor dimana hal itu dapat mempengaruhi kondisi dan situasi di lingkungan sosial, sehingga dapat menyebabkan terjadinya masalah sosial. Banyak komponen agar dapat memahami arti dari masalah sosial yang sesungguhnya. Adapun komponen masalah sosial seperti yang dikemukakan oleh menurut Parrillo (1987:4) yang dikutip oleh Soetomo (2013:6) sebagai berikut:

- a. Kondisi tersebut merupakan masalah yang bertahan untuk suatu periode waktu tertentu. Kondisi yang dianggap sebagai masalah, tetapi dalam waktu singkat kemudian sudah hilang dengan sendirinya tidak termasuk masalah sosial.
- b. Dirasakan dapat menyebabkan berbagai kerugian fisik atau non fisik, baik pada individu maupun masyarakat.
- c. Merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai atau standar sosial dari salah satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat.
- d. Menimbulkan kebutuhan akan pemecahan.

Komponen di atas jelas bahwa suatu masalah dapat dikatakan sebagai masalah sosial apabila masyarakat dirasa masalah tersebut dapat tidak menyenangkan hal ini terjadi dalam waktu yang lama dan juga sulit dipecahkan terkadang setiap masalah sosial pasti membutuhkan penyelesaian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Masalah sosial sangat merugikan individu maupun masyarakat baik secara fisik atau mental. Masalah sosial disebabkan pelanggaran terhadap nilai-nilai dan standar sosial dari satu atau beberapa sendi kehidupan masyarakat. Sehingga masalah tersebut membutuhkan pemecahan sosial sebagai solusinya agar terciptanya suatu kondisi yang sejahtera.

2.3.4. Tahap *Treatment* Penanganan Masalah Sosial

Tahap *Treatment*, adalah pemecahan masalah sosial yang didasari oleh hasil diagnosis. Masalah sosial membutuhkan suatu penanganan yang efektif dapat dilakukan menggunakan tahapan yang tersusun agar tepat dalam menangani suatu masalah sosial yang sedang dihadapi. Tahapan dalam upaya pemecahan masalah sosial yang dilakukan menurut Soetomo (2013:52) yaitu:

1. Usaha Rehabilitatif
Masalah ini terletak pada kondisi penyandang masalah sosial, terutama upaya untuk melakukan perubahan atau perbaikan terhadap kondisi yang tidak diharapkan atau yang dianggap bermasalah, menjadi kondisi Faktor ekonomi penyebab masalah sosial terbesar, karena individu atau kelompok perlu mencukupi kebutuhannya. Pemerintah perlu mengatasi kesenjangan ekonomi seperti distribusi dan produksi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
2. Usaha Preventif
Fokus utama Usaha Preventif pada kondisi masalah sosial yang belum terjadi, walaupun mungkin saja di dalamnya terkandung potensi munculnya masalah sosial. dengan perkataan lain usaha ini merupakan usaha pencegahan agar masalah sosial tidak terjadi.
3. Usaha *Developmental*
Usaha *Developmental* untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau sekelompok orang agar dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik, dengan peningkatan kemampuan tersebut, maka akan tercipta iklim yang kondusif bagi masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan kebutuhan dalam kehidupannya.

Disimpulkan dari pernyataan dan penjelasan di atas, penanganan masalah sosial yang merupakan *treatment* perlu dilakukan secara komprehensif, tidak semata-mata melakukan rehabilitatif terhadap penyandang masalah, tetapi juga melakukan upaya pencegahan (preventif) dan pengembangan (*Developmental*). Usaha-usaha tersebut dimaksudkan yaitu usaha rehabilitatif, akibat dari kondisi yang tidak sehat dan menjadi kondisi sesuai dengan harapan atau standar yang

berlaku. Usaha preventif adalah usaha yang dilakukan dengan yang belum terjadi masalah sosial. Maka usaha preventif berarti mencegah dan tidak terjadinya suatu masalah sosial. Sedangkan *usaha developmental* dijadikan untuk kemampuan seseorang agar dapat memenuhi kehidupan yang lebih baik agar memenuhi apa yang dibutuhkan artinya fasilitasi secara sosial terpenuhi, maka masyarakat dapat menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan kebutuhan dalam kehidupannya.

2.4. Pemberdayaan Perempuan

2.4.1. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang gagasan utamanya berkaitan erat dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan itu sendiri acap kali serupa dengan kemampuan seseorang atau individu untuk memerintah orang lain untuk melakukan apa yang ingin kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. (Suharto, 2021). Sedangkan Shardlow (dalam Marmoah, 2014) menegaskan bahwa pemberdayaan sebagai suatu ide atau gagasan tidak jauh berbeda dengan konsep Biestek yang dikenal di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial dengan nama “*self-determination*”, yaitu salah satu prinsip dasar dalam bidang kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Inti dari prinsip ini yaitu untuk mendorong klien mencari sendiri solusi atas permasalahan yang mereka hadapi, sehingga klien tersebut memiliki kesadaran dan kekuasaan penuh atas dirinya. Dalam pemberdayaan terdapat partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemilihan untuk mencapai perubahan pada kondisi kehidupan serta meningkatnya kemampuan masyarakat menjadi lebih baik. Pemberdayaan merupakan sebuah proses dari perubahan sikap dan perilaku sosial

masyarakat dengan cara meningkatkan serta memanfaatkan potensi yang ada. Jadi, pemberdayaan pada intinya yaitu bagaimana seorang individu, kelompok atau komunitas memiliki daya upaya untuk mengendalikan kehidupan mereka serta berupaya untuk menciptakan masa depan yang sesuai dengan keinginan dan cita-cita mereka.

Dalam KBBI yang merupakan singkatan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah tindakan, cara, dan proses pemberdayaan. Sedangkan makna ‘*empowering*’ mengacu pada proses ‘membuat berdaya’. Pemberdayaan sendiri berasal dari kata ‘kekuasaan’, yang dapat ditafsirkan menjadi kemampuan melakukan sesuatu atau kapasitas yang dimiliki seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Disini manusia memiliki peran penting dalam bidang pembangunan, maka istilah “pemberdayaan” tidak lagi menjadi asing jika digunakan dalam konteks pembangunan secara umum.

Carlzon dan Macauley (dalam Marmoah, 2014) berpendapat bahwa yang dimaksud dengan pemberdayaan yaitu pembebasan individu dari belenggu dan pemberian kebebasan kepada orang-orang untuk bertanggung jawab karena pemikiran yang mereka miliki, pilihan yang mereka buat, dan tindakan yang mereka lakukan. Sementara Carver dan Clatter Back (dalam Marmoah, 2014) menyatakan bahwa “pemberdayaan sebagai “usaha memberikan kesempatan kepada individu untuk memiliki keberanian dan tanggung jawabnya guna meningkatkan dan memberikan partisipasi berdasarkan tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi”. Lebih lanjut, Talcott Parsons (dalam Marmoah 2014)

mendefinisikan pemberdayaan adalah “proses yang memungkinkan seorang individu memiliki kemampuan yang kuat untuk mengambil bagian dalam berbagai peran manajemen di lembaga serta kegiatan yang berhubungan dengan hidupnya”. Ife (dalam Marmoah, 2014) juga mengemukakan “tujuan pemberdayaan itu sendiri yaitu untuk memperkuat kekuatan individu yang lemah, rentan atau kurang beruntung untuk bersaing secara efektif dengan yang lainnya”.

Dengan adanya keterampilan, pengetahuan, dan kekuatan yang memadai, seorang individu mampu mempengaruhi tidak hanya kehidupannya sendiri tetapi juga kehidupan orang lain yang penting baginya. Ini merupakan prinsip utama yang dimiliki oleh pemberdayaan. Istilah "pemberdayaan" mengacu pada kapasitas individu, khususnya kelompok rentan dan tidak berdaya, untuk memiliki kesempatan menggunakan sumber daya produktif yang akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan baik pendapatan mereka maupun barang dan jasa yang mereka butuhkan serta kapasitas mereka untuk andil di dalamnya. Orang-orang yang menjadi bagian dari kelompok yang terpinggirkan dan tertindas sangat membutuhkan pemberdayaan dalam masyarakat saat ini. Alih-alih masyarakat menjadi sasaran proyek pembangunan individu, masyarakat sendiri dijadikan fokus utama dari pekerjaan pembangunan yang sedang dilakukan. Ini adalah taktik utama yang akan digunakan dalam pelaksanaan konsep pemberdayaan. Oleh karena itu, proses pengembalian kekuasaan kepada masyarakat perlu dilakukan dengan pendekatan sebagai berikut:

- 1) Upaya ini harus memiliki tujuan yang jelas. Ini berarti upaya ini harus menargetkan individu secara langsung yang membutuhkan program yang

disesuaikan untuk mengatasi persoalan dan kebutuhan yang mereka hadapi dalam hidupnya.

- 2) Dibutuhkan masyarakat yang akan merasakan dampak langsung dari program ini. Dengan melibatkan masyarakat yang akan menerima bantuan, beberapa tujuan dapat dicapai, salah satunya adalah agar bantuan yang diberikan bermanfaat bagi penerima karena memenuhi kebutuhan mereka dan secara akurat mengidentifikasi kemampuan dan kebutuhan yang dibutuhkan mereka. Selain itu, pada saat yang sama, kemampuan masyarakat untuk mengalami, merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggung jawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya.
- 3) Diperlukan pendekatan kelompok untuk menghindari tantangan yang muncul ketika mencoba mencari solusi atas masalah pada tingkat individu, terutama bagi yang kurang beruntung. Jika setiap transaksi ditangani oleh satu orang, cakupan bantuan yang diberikan juga akan sangat luas. Strategi kolaboratif ini memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan cara seefektif mungkin.

Pembagian kekuasaan yang adil hingga menimbulkan dorongan akan kesadaran dan adanya partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan, ini dinamakan pemberdayaan perempuan. Hal ini menurut Moulton yang dikutip dalam Prijono dan Prijoko (dalam Marmoah, 2014), menyatakan bahwa “konsep pemberdayaan perempuan itu sendiri yaitu mendorong lebih banyak partisipasi dan kesadaran yang lebih besar dari perempuan”. Gagasan ini sering dikaitkan dengan konsep perempuan untuk menjadi versi penuh dari diri mereka sendiri

untuk memperkuat keberadaan atau kehadiran mereka di masyarakat serta untuk mewujudkan potensinya secara maksimal. Pemberdayaan perempuan lebih menekankan pada keinginan atau tuntutan perempuan untuk berbagi kekuasaan, keikutsertaan serta mengambil bagian dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan program pembangunan.

Jika ditinjau berdasarkan pendapat dari Suadnyawati dan Suma (2010), “pemberdayaan perempuan miskin di pedesaan seharusnya diprioritaskan dengan cara meningkatkan kualitas perempuan agar mampu bersaing dalam kehidupan nyata dilapangan”. Artinya, jika kualitas perempuan miskin di pedesaan meningkat, maka akan terjadi hubungan timbal balik yang dapat meningkatkan tugas untuk menjalankan fungsi keluarga. Diharapkan juga adanya peningkatan ekonomi keluarga yang akan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga dan pembangunan desa. Dengan kata lain, ini akan berdampak peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan desa. Dengan kata lain, ini akan berdampak peningkatan kesejahteraan keluarga dan pembangunan desa.

Tujuan pemberdayaan perempuan merupakan penguatan perempuan yang didasarkan pada hubungan antara kebebasan pribadi seseorang dan aturan-aturan sosial yang berlaku dalam berbagai bentuk kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Istilah “pemberdayaan perempuan” tidak boleh disalahartikan bahwa perempuan harus dipaksa bersaing dengan laki-laki di sektor publik untuk mencapai posisi yang setara. Sebaliknya, istilah tersebut harus dipahami sebagai bentuk dorongan bagi perempuan (dan juga laki-laki) untuk menciptakan kerjasama dan sinergi

yang baik antara perempuan dan laki-laki, baik di sektor domestik maupun publik, demi tercapainya tatanan keluarga dan masyarakat yang aman dan nyaman.

Upaya pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui kegiatan sosialisasi atau advokasi pendidikan dan pelatihan bagi perempuan yang bergerak di segala bidang atau sektor dimana hal ini dilakukan untuk mendukung dan mempercepat pencapaian kualitas hidup dan mitra setara bagi laki-laki dan perempuan. Kegiatan dan upaya advokasi ini dilakukan untuk memajukan tujuan mendukung dan mempercepat pencapaian kualitas hidup dan mitra yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa semua warga negara, termasuk perempuan, berhak atas taraf hidup yang paling tidak memadai, pemerintah dalam banyak penymarannya dan dalam berbagai organisasi, baik publik maupun swasta, bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. tentang pemberdayaan perempuan.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan jumlah sumber daya manusia yang terjangkau bagi perempuan untuk membekali mereka dengan pengetahuan, kemampuan, dan rasa percaya diri yang diperlukan untuk hidup mandiri, serta sifat-sifat yang diperlukan untuk memiliki rasa tanggung jawab sosial, iman, dan kesetiaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 2) Kerangka proses pembangunan perempuan memerlukan terciptanya langkah-langkah yang terpadu dan harmonis antara berbagai sektor dan subsektor pemerintahan, organisasi (sosial dan politik), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), tokoh masyarakat, serta tokoh dan tokoh agama.

Kebijakan pemberdayaan perempuan adalah kebijakan pemerintah yang digunakan dalam pelaksanaan program pemberdayaan perempuan untuk memperoleh hasil yang diinginkan, yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Kebijakan tersebut antara lain:

- 1) Mempertimbangkan peran perempuan dalam pembangunan daerah di semua industri dan menggunakan kelembagaan dan *platform* yang sudah ada.
- 2) Meningkatkan jumlah lembaga yang menangani isu pemberdayaan perempuan sebagai forum jaringan untuk mendukung kemajuan dan kemandirian perempuan.
- 3) Meningkatnya tingkat komitmen yang ditunjukkan oleh lembaga publik, komersial, dan nirlaba terhadap tujuan pemberdayaan perempuan dalam hal pembentukan lembaga baru, perencanaan dan pelaksanaan program baru, serta pemantauan dan penilaian yang ada program.

Hadirnya partisipasi dan pengembangan masyarakat, bisa dikatakan sebagai dua pendekatan yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan gagasan pemberdayaan perempuan melalui proses pengembangan masyarakat. Kedua strategi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pemberdayaan yang mengacu pada proses pembangunan. yang digerakkan dari dalam masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Melalui gagasan tersebut, jika diterapkan dalam kegiatan yang dilakukan motivasinya akan berasal dari kebutuhan masyarakat yang akan menerima manfaatnya dari program tersebut yang merupakan salah satu inisiatif pengembangan masyarakat.

Sementara itu, pengikutsertaan masyarakat diartikan sebagai anggota yang ikut serta dalam suatu program sebagai peserta atau penerima manfaatnya kelak. Partisipasi perempuan tersebut tidak sebatas pada pelaksanaan program semata, melainkan juga dengan konsep ide-ide baru, kemudian ke tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya menghasilkan hasil sesuai dengan harapan dan efektif serta bermanfaat bagi masyarakat. Dari kegiatan atau program tersebut, diharapkan kegiatan pemberdayaan perempuan yang diselenggarakan sesuai, menguntungkan serta bermanfaat bagi seluruh pihak.

2.4.2. Prinsip Pemberdayaan

Sobriyan (2018) mengemukakan bahwa terdapat 4 prinsip tolak ukur keberhasilan program pemberdayaan, diantaranya sebagai berikut:

1) Kesetaraan

Dalam proses pemberdayaan masyarakat, prinsip terpenting yang harus dipegang teguh adalah terciptanya kesetaraan status antara anggota masyarakat dengan lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Ini adalah prinsip terpenting yang harus dipatuhi. Dinamika yang perlu dibentuk dalam relasi yang setara dibangun dengan membangun metode untuk saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi satu sama lain. Hal ini penting untuk mencapai kesetaraan. Oleh karena itu, semua pihak yang terlibat dituntut untuk saling mengenal bakat dan keterbatasan masing-masing agar tercipta lingkungan yang kondusif bagi proses pendidikan dan pertumbuhan bersama.

2) Partisipasi

Dalam partisipasi suatu program dirancang, dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri. Jenis program ini mendorong tingkat kemandirian masyarakat yang lebih tinggi. Namun, untuk mencapai level ini, perlu menginvestasikan waktu dan berpartisipasi dalam program pendampingan yang menyertakan orang-orang yang memiliki komitmen kuat terhadap pemberdayaan masyarakat.

3) Kemandirian

Mengakui dan menilai kemampuan masyarakat lebih penting daripada bantuan yang diberikan oleh sumber luar, ini merupakan pedoman dalam prinsip ini. Pada konsep ini memandang masyarakat miskin sebagai subjek yang tidak memiliki kemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki keterbatasan kemampuan (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menghemat uang, pengetahuan yang tinggi terhadap hambatan-hambatan yang terjadi pada usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, tenaga kerja dan tekad yang kuat, serta memiliki norma-norma sosial yang sudah dianut dalam jangka waktu yang lama. Semua itu perlu digali dan dimanfaatkan sebagai modal dasar dalam proses pemberdayaan. Pemberian bantuan keuangan dari orang lain harus diartikan sebagai dukungan agar tingkat kemandirian penerima tidak berkurang akibat menerima bantuan. Ketika sampai pada proses pengembangan pemberdayaan masyarakat, gagasan "memulai dengan apa yang dimiliki" menjadi pedoman. Pada saat yang sama, bantuan teknis perlu dirancang dengan cara yang mengarah pada pembangunan kapasitas. Hal ini diperlukan agar pengelolaannya dapat diserahkan kepada orang-orang yang telah mampu mengorganisir diri untuk memecahkan dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapinya.

4) Berkelanjutan

Sekalipun pada awalnya peran fasilitator lebih dominan dari pada masyarakat itu sendiri, program pemberdayaan perlu dirancang agar dapat berjalan sendiri setelah fasilitator pergi. Sebaliknya, masyarakat lambat laun akan mampu mengelola dan mengontrol kegiatannya sendiri, yang mengakibatkan peran fasilitator berkurang atau bahkan dihilangkan sama sekali. Ini akan terjadi perlahan tapi pasti.

2.4.3. Strategi Pemberdayaan

Sobriyan (2018) mengemukakan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau melalui beberapa kegiatan berikut:

1) Pembentukan Kelompok

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat yang rentan atau miskin di wilayah ini diberikan kebebasan untuk mengatur diri sendiri dan beroperasi secara berkelompok sesuai dengan preferensi atau kebutuhan yang mereka miliki. Terbentuknya kelompok-kelompok tersebut bermanfaat karena menjadi

landasan bagi berkembangnya kohesi sosial di antara para anggota kelompok.

2) Pendampingan Fungsi

Pentingnya bantuan tidak bisa dilebih-lebihkan ketika menyangkut penghancuran kegiatan kelompok. Dalam tahap ini, pendamping bertanggung jawab mengelola proses pengembangan dan penataan kelompok dalam beberapa kapasitas, baik sebagai komunikator (penghubung), dinamisator, maupun fasilitator (pemandu) / (penggerak). Bantuan ini dimaksudkan untuk membantu kelompok berkembang dan berfungsi sebagai kelompok aksi otonom sehingga mereka tidak bergantung pada individu atau organisasi dari luar.

3) Perencanaan Kegiatan

Pada tahap ini menekankan kepada peran secara aktif anggota kelompok dalam meningkatkan taraf hidup melalui kemampuan yang dimiliki. Adapun prinsip pada tahapan ini, yaitu :

- a) Prinsip keterpaduan, menyatakan bahwa suatu kegiatan pemberdayaan dapat dikatakan sempurna atau sah jika dikaitkan dengan kegiatan lain termasuk dalam lingkup wilayah yang bersangkutan.
- b) Prinsip kepercayaan, merupakan komponen yang krusial dari partisipasi dan pemberdayaan
- c) Prinsip kebersamaan dan kegotongroyongan, kegiatan pemberdayaan harus mampu menumbuhkan semangat kebersamaan, gotong royong, solidaritas, dan kemitraan antar anggota kelompok agar berpegang pada gagasan kebersamaan dan gotong royong.
- d) Prinsip kemandirian, asas kemandirian menekankan bahwa kegiatan atau program harus dapat meningkatkan rasa percaya diri, yang berarti bahwa masyarakat miskin pun juga memiliki kemampuan untuk menolong dirinya sendiri. Selain itu, kegiatan atau program tersebut harus bermanfaat dalam meningkatkan taraf hidup anggota kelompok dan harus dapat berkembang secara berkelanjutan. Selain itu, kepatuhan terhadap mandat ini bahwa program dan kegiatan pada prinsipnya dirancang dengan cara yang tidak menyebabkan kerusakan lingkungan alam sekitarnya.

2.4.4. Tujuan Pemberdayaan

Sobriyan (2018) berpendapat bahwa perlu “pemahaman tentang berbagai macam indikator keberdayaan, yang dapat mengungkapkan apakah seseorang

berdaya atau tidak, untuk menentukan fokus operasional dan tujuan pemberdayaan”. Hal tersebut dilakukan supaya ketika nanti program pemberdayaan dilaksanakan, dapat difokuskan pada aspek perubahan (misalnya keluarga berpenghasilan rendah) yang perlu dioptimalkan. Sejauh mana komunitas diberdayakan dapat dievaluasi berdasarkan kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol mereka. Kelima faktor tersebut membentuk dimensi yang dapat digunakan untuk tolak ukur keberhasilan tersebut. Kelima dimensi tersebut merupakan kategori analisis dinamis yang saling terkait satu sama lain secara sinergis, saling menguatkan, dan saling melengkapi. Penjelasan lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Kesejahteraan

Berbicara perihal tingkat kesejahteraan yang dapat diukur melalui kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, papan, pangan, pendapatan, pendidikan dan kesehatan.

- 2) Akses

Dimensi ini berfokus untuk memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang sama tanpa terkecuali terhadap sumber daya dan manfaat yang dihasilkan oleh sumber daya tersebut. Jika tidak ada akses, kemungkinan yang terjadi yaitu hadirnya hambatan untuk mencapai standar hidup yang lebih tinggi. Disparitas pada dimensi ini disebabkan oleh ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya yang dimiliki oleh mereka yang berada di kelas sosial atas dan bawah, serta mereka yang berkuasa dan mereka yang dikuasai, serta mereka yang berada di tengah dan mereka yang berada di

bawah serta antara pusat dan pinggiran. Ada banyak bentuk berbeda yang dapat diambil oleh sumber daya, termasuk waktu, tenaga kerja, tanah, kredit, informasi, keterampilan, dan sebagainya.

3) Kesadaran kritis

Pada tataran ini, pemberdayaan masyarakat berarti membangkitkan dan menyadarkan masyarakat bahwa perbedaan yang ada merupakan bentukan sosial yang dapat dan harus diubah. Kehadiran kesenjangan dalam kehidupan masyarakat misalnya, sejatinya bukan hasil dari tatanan alam yang sudah ada atau semata-mata karena kehendak Tuhan. Melainkan, perbedaan ini bersifat struktural dan merupakan akibat langsung dari diskriminasi yang dilembagakan.

4) Partisipasi

Prinsip ini melibatkan masyarakat dalam berbagai lembaga yang ada di dalamnya. Artinya, masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan sehingga kepentingan dari masyarakat pun juga tidak bisa diabaikan.

5) Kontrol

Dalam hal ini, masyarakat ikut memegang kendali terhadap pengelolaan sumber daya yang ada. Maka dari itu, dari adanya sumber daya yang tersedia masyarakat tanpa terkecuali dapat memanfaatkannya termasuk dalam hal mewujudkan hak-haknya.

Tujuan dari program pemberdayaan yaitu untuk mengarahkan pada pembentukan individu dan komunitas yang mandiri, tanpa adanya pengaruh dari

luar. Kemandirian ini meliputi kebebasan berpikir, bertindak serta mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat itu sendiri adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan, dan melakukan sesuatu yang dianggap tepat guna mencapai solusi atas permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan yang terdiri dari kognitif, konatif, psikomotorik, efektif, dengan penyebaran sumber daya oleh lingkungan internal masyarakat. Pemberdayaan anggota suatu komunitas seharusnya menghasilkan pengembangan kognitif komunitas yang lebih berkualitas. Tujuan pemberdayaan adalah untuk membuat orang lebih mandiri dan berpikiran terbuka, serta untuk meningkatkan keahlian mereka sehingga mereka lebih mampu memberikan kontribusi untuk kesejahteraan orang lain dengan menggunakan pengetahuan dan kemampuan mereka untuk digunakan dalam bentuk pekerjaan atau usaha bisnis. Pemberdayaan yang merupakan salah satu contoh pembangunan sosial diharapkan mampu memfasilitasi terbentuknya masyarakat yang positif dan bermuara pada terciptanya masyarakat yang ideal. Berikut beberapa tujuan dan capaian yang dapat diantisipasi dari pemberdayaan perempuan:

- a) Melaksanakan kebijakan yang efektif dalam program pemberdayaan perempuan khususnya pada bidang pembangunan ekonomi.
- b) Mendorong tumbuh kembangnya perekonomian rumah tangga melalui berbagai kegiatan maupun usaha yang membuktikan bahwa perempuan berperan sebagai penggerak utama (*prime mover*).

- c) Membuka wawasan tentang *weakness* dan *threat* jika pembangunan ekonomi mengabaikan perspektif gender.
- d) Memperluas pengetahuan tentang potensi yang dimiliki dan pentingnya kesetaraan gender dalam pembangunan perekonomian bangsa termasuk guna meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, keluarga hingga negara dan bangsa.
- e) Meningkatkan kemampuan dan peran serta dalam membangun.
- f) Perekonomian berperspektif gender, termasuk memahami bagaimana penerapannya di berbagai lapisan masyarakat, dalam konteks geo sosial, budaya, agama yang beragama di Indonesia.
- g) Memperkuat koordinasi, dukungan dan kerjasama berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas perempuan wirausaha di berbagai wilayah di Indonesia.

Berbicara mengenai fokus utama dalam upaya pemberdayaan yakni kelompok masyarakat yang berjuang secara ekonomi. Dengan kata lain, yang belum mampu mandiri secara ekonomi, atau masyarakat yang terpinggirkan atau masyarakat yang terpinggirkan di perkotaan sehingga tidak dapat menikmati pembangunan di perkotaan. Perlu adanya perhatian khusus bagi masyarakat yang kurang mampu atau terpinggirkan secara ekonomi, agar dapat maju dan mengembangkan potensinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan keluarga Indonesia. Fenomena ini dapat ditemui termasuk di daerah pedesaan serta lokasi lainnya. Keberadaan peraturan perundang-undangan telah

memungkinkan untuk mengkaji peran perempuan dalam proses mengatasi tantangan ekonomi yang dihadapi keluarga.

Berikut peraturan yang mengatur mengenai pemberdayaan perempuan tercantum dalam UU No. 25 Tahun 2005 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000-2004 yang mencakup:

- 1) Program peningkatan kualitas hidup perempuan,
- 2) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemberdayaan perempuan, Program peningkatan peran masyarakat dan kemampuan kelembagaan pengarusutamaan gender.

2.4.5. Indikator Keberhasilan Program Pemberdayaan

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra ke-sejajaran antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan dapat dilihat adanya indikator-indikator sebagai berikut (Suharto, 2003):

- 1) Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.
- 2) Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka.
- 3) Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan karier sebagaimana halnya laki-laki.
- 4) Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga legislatif, eksekutif dan pemerintahan.
- 5) Peningkatan keterlibatan aktivis perempuan dalam kampanye pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.

2.5. Kebutuhan Dasar

2.5.1. Konsep Kebutuhan Dasar

Manusia hidup dikelilingi oleh berbagai kebutuhan agar hidupnya bermakna dan sejahtera. Terdapat 2 macam sifat kebutuhan didalam hidup manusia, yaitu kebutuhan yang harus cepat pemenuhannya ada pula yang tidak. Kebutuhan yang harus cepat dipenuhi disebut juga kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar yaitu kebutuhan yang sangat mempengaruhi kehidupan seseorang, sehingga berdampak penting pada kehidupan dan harus dipenuhi secepatnya. Setiap manusia pada dasarnya memiliki kebutuhan yang sama, tetapi karena setiap manusia memiliki budaya yang berbeda-beda maka kebutuhan pun akan berbeda satu sama lain. Maka dari itu manusia memiliki kebutuhan dasar yang bersifat heterogen. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia menyesuaikan diri pada prioritas. Jika gagal memenuhi kebutuhannya, manusia akan berpikir lebih keras dan berusaha untuk mendapatkannya. Potter dan Perry dalam Uliyah (2014:4) berpendapat bahwa kebutuhan dasar yaitu “Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis, yang tentunya bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan”.

Kebutuhan hidup masyarakat yang maju dan masyarakat yang sederhana pun tentu berbeda. Masyarakat yang berada di kota memiliki kebutuhan yang berbeda dengan masyarakat yang berada di pelosok desa. Meskipun kebutuhan pada masyarakat kota dan desa berbeda, tetapi pada dasarnya kebutuhan dasar tetap memiliki ciri karakteristik yang sama. Abraham Maslow menyatakan bahwa kebutuhan dasar manusia dapat dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu:

- 1) Bahwa kebutuhan manusia itu bertahap, dan membentuk suatu hirarki dari fisiologis rasa aman, kebutuhan sosial, harga diri, dan aktualisasi diri.
- 2) Bahwa manusia mempunyai kebutuhan yang berkelanjutan.
- 3) Bahwa kebutuhan manusia saling tergantung dan saling melengkapi.
- 4) Bahwa kebutuhan yang telah terpenuhi akan berhenti sebagai motivasi, dan di gantikan oleh kebutuhan berikutnya.

Menurut Maslow bahwa “sebelum memenuhi kebutuhan yang berada di tingkatan kedua, maka harus dipenuhi terlebih dahulu kebutuhan yang berada di tingkatan utama yang mana setelah itu akan menyebabkan pemenuhan kebutuhan yang lebih tinggi”. Maka dari itu kebutuhan dasar manusia terbentuk layaknya segitiga piramida. Adapun kebutuhan dasar manusia yaitu sebagai berikut:

1) Kebutuhan Fisiologis

Menurut Maslow, “kebutuhan dasar yang paling mendasar adalah kebutuhan fisiologis”. Yang termasuk kebutuhan fisik yaitu seperti seperti oksigen, cairan (minuman), nutrisi (makanan), keseimbangan suhu tubuh, eliminasi, tempat tinggal, istirahat dan tidur, serta kebutuhan seksual. Kebutuhan fisik yang mana adalah kebutuhan yang paling utama bagi manusia maka kebutuhan fisik harus segera dipenuhi agar manusia dapat melangsungkan kehidupannya.

2) Kebutuhan Rasa Aman

Kebutuhan akan rasa aman ini menjadi kebutuhan dasar jika kebutuhan pertama atau kebutuhan fisik sudah di penuhi. Seorang manusia tentu ingin bebas dari rasa takut serta cemas yang membelenggu hidup mereka. Kebutuhan rasa aman dan perlindungan dibagi menjadi perlindungan fisik dan perlindungan psikologis. Perlindungan fisik meliputi perlindungan atas

ancaman terhadap tubuh atau hidup. Ancaman tersebut dapat berupa penyakit, kecelakaan, bahaya dari lingkungan, dan sebagainya. Perlindungan psikologis, yaitu perlindungan atas ancaman dari pengalaman yang baru dan asing. Misalnya, kekhawatiran yang dialami seseorang ketika masuk sekolah pertama kali karena merasa terancam oleh keharusan untuk berinteraksi dengan orang lain, dan sebagainya. Terdapat banyak cara untuk memenuhi kebutuhan keamanannya, yang dapat ditelusuri dalam kehidupan masyarakat agar terbebas dari rasa takut tersebut bisa dilaksanakan dengan belajar atau menjadi anggota perkumpulan bela diri.

3) **Kebutuhan Rasa Cinta serta Rasa Memiliki dan Dimiliki**

Kebutuhan yang ketiga yaitu rasa cinta serta merasa memiliki dan dimiliki oleh orang lain, seperti memberi dan menerima kasih sayang, cinta, mendapatkan kehangatan ditengah keluarga, memiliki teman, diterima di kelompok sosial dan sebagainya.

4) **Kebutuhan akan Harga Diri**

Kebutuhan akan harga diri meupun rasa dihargai oleh orang lain. Kebutuhan ini terkait dengan dimana rasa ingin untuk mendapatkan kekuatan, meraih penghargaan, memiliki rasa percaya diri. Selain dari itu juga memerlukan pengakuan dari orang lain. Misalnya, diterima ditengah kelompok maupun ditengah keluarganya.

5) **Kebutuhan Aktualisasi Diri**

Pada tahap akhir adalah kebutuhan untuk berbeda dengan orang lain dengan mengaktualisasi/menampakkan hal-hal yang ada pada dirinya. kebutuhan

aktualisasi diri, merupakan kebutuhan yang tertinggi dalam hierarki Maslow, dimana kebutuhan untuk berkontribusi pada orang lain/lingkungan serta mencapai potensi atau kemampuan diri secara penuh. Misalnya, bagi seseorang pelukis dia menginginkan kesempatan untuk dapat melukiskan sesuai dengan jiwanya. Begitupula bagi seseorang yang mempunyai kemampuan atau hal-hal lain yang dapat menjadikan dirinya berbeda dari pada orang lain, mempunyai kebutuhan untuk dapat mengekspresikan dirinya. Sedangkan kebutuhan menurut David McClelland (dalam Diniaty, 2014) yaitu “kebutuhan bisa terjadi jika seseorang individu merasa adanya ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang diharapkan. Kebutuhan itu sendiri juga menentukan tujuan realistik serta pengambilan resiko. Kebutuhan tersebut yaitu ulet, tidak putus asa, menerima pelajaran dengan baik, rajin belajar dan penuh semangat”.

2.5.2. Faktor yang Mempengaruhi Kebutuhan Dasar

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan manusia, suatu kebutuhan manusia bisa berubah dengan seiring berjalannya waktu, baik itu berupa barang maupun jasa. Beberapa faktor tersebut menurut Hidayat dan Uliyah (2014:4) adalah:

1. Penyakit. Adanya penyakit dalam tubuh dapat menyebabkan perubahan pemenuhan kebutuhan, baik secara fisiologis maupun psikologis, karena beberapa fungsi organ tubuh memerlukan pemenuhan kebutuhan lebih besar dari biasanya.
2. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga yang baik dapat meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar karena adanya saling percaya, merasa kesenangan hidup, tidak ada rasa curiga, dan lain-lain.

3. Konsep diri. Konsep diri manusia memiliki peran dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Konsep diri yang positif memberikan makna dan keutuhan (wholeness) bagi seseorang. Konsep diri yang sehat menghasilkan perasaan positif terhadap diri. Orang yang merasa positif tentang dirinya akan mudah berubah, mudah mengenali kebutuhan, dan mengembangkan cara hidup yang sehat, sehingga mudah memenuhi kebutuhan dasarnya.
4. Tahap perkembangan. Sejalan dengan meningkatnya usia, manusia mengalami perkembangan. Setiap tahap perkembangan tersebut memiliki kebutuhan yang berbeda,
5. baik kebutuhan biologis, psikologis, sosial, maupun spiritual, mengingat beberapa fungsi organ tubuh mengalami proses kematangan dengan aktivitas yang berbeda.

2.5.3. Komponen Kebutuhan Dasar

Kebutuhan dasar manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia dalam mempertahankan keseimbangan fisiologis maupun psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidupnya. Menurut Henderson yang dikutip oleh Potter dan Perry (1997) dalam Hidayat dan Uliyah (2014:5) membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam 14 komponen:

1. Bernafas secara normal
2. Makan dan minum yang cukup
3. Eliminasi (buang air besar dan kecil)
4. Bergerak dan mempertahankan postur yang diinginkan
5. Tidur dan istirahat
6. Memilih pakaian yang tepat
7. Mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran normal dengan menyesuaikan pakaian yang dikenakan dan memodifikasi lingkungan
8. Menjaga kebersihan diri dan penampilan
9. Menghindari bahaya dari lingkungan dan menghindari membahayakan orang lain
10. Berkomunikasi dengan orang lain dalam mengekspresikan emosi, kebutuhan, kekhawatiran dan opini.
11. Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan
12. Bekerja sedemikian rupa sebagai modal untuk membiayai kebutuhan hidup
13. Bermain atau berpartisipasi dalam berbagai bentuk rekreasi

14. Belajar, menemukan atau memuaskan rasa ingin tahu yang mengarah pada perkembangan yang normal, kesehatan, dan penggunaan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Sementara itu, B. Talento dalam Hidayat dan Uliyah (2014:6) membagi kebutuhan dasar manusia ke dalam dua peringkat utama, yaitu: kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah (*lower order needs*) dan kebutuhan yang tingkatnya lebih tinggi (*higher order needs*). Pemenuhan kebutuhan yang tingkatnya lebih rendah tidak selalu membantu upaya kompleks manusia untuk mencapai aktualisasi diri. Tiap kebutuhan dipandang dalam konteksnya terhadap kebutuhan lain, dan semuanya dianggap penting.

Konsep kebutuhan dasar disini dalam konteks komponen kebutuhan dasar dan karakteristik kebutuhan dasar serta hubungan keduanya dengan garis kemiskinan. Rumusan komponen kebutuhan dasar menurut beberapa ahli (dalam BPS, 2008) adalah sebagai berikut:

- a) Menurut United Nations, komponen kebutuhan dasar terdiri atas kesehatan, bahan makanan dan gizi, pendidikan, kesempatan kerja dan kondisi pekerjaan, perumahan, sandang, rekreasi, jaminan sosial, dan kebebasan manusia.
- b) Menurut UNSRID, komponen kebutuhan dasar terdiri atas: (i) kebutuhan fisik primer yang mencakup kebutuhan gizi, perumahan, dan kesehatan; (ii) kebutuhan kultural yang mencakup pendidikan, rekreasi dan ketenangan hidup; dan (iii) kebutuhan atas kelebihan pendapatan.
- c) Menurut Ganguli dan Gupta, komponen kebutuhan dasar terdiri atas gizi, perumahan, pelayanan kesehatan pengobatan, pendidikan, dan sandang.

2.5.4. Jenis-jenis Kebutuhan Dasar Manusia

Kebutuhan dasar manusia merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap orang agar bisa bertahan hidup dan mencapai kesehatannya. Terdapat beberapa cara dalam mengklasifikasikan kebutuhan manusia. Kalisifikasi tersebut menurut Davis dan Newstorm (1993: 66-71) dalam Soeharto (1997:157), yaitu:

1. Kebutuhan primer yang meliputi kebutuhan fisik pokok, seperti akan makanan, minuman, seks, tidur, suhu yang cukup menyenangkan. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan utama yang penting bagi kelangsungan hidup manusia.
2. Kebutuhan sekunder yang meliputi kebutuhan psikologis dan sosial. Termasuk dalam kebutuhan ini adalah keinginan untuk diperhatikan, dihargai, mencintai dan dicintai, kebutuhan untuk bersosialisasi dan rekreasi.

Kedua aspek di atas saling berkaitan satu sama lain dimana keduanya sangat penting dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia dan merupakan kebutuhan yang bersifat universal, dalam arti dimiliki oleh setiap orang. Meskipun kebutuhan tersebut berbeda bagi setiap orang sesuai dengan karakteristiknya dan kebiasaan orang tersebut. Menurut Soeharto (1997:159) membagi kebutuhan dasar kedalam beberapa jenis, yaitu:

1. Kebutuhan fisik. Kebutuhan yang mendasar dan universal yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, misalnya makan, minum, pakaian, tidur, seks, dan perawatan kesehatan.
2. Kebutuhan psikologis. Kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam kaitannya dengan aspek kejiwaan atau psikis manusia. Misalnya, kebutuhan akan harga diri, kasih sayang, dihargai dan menghargai, mengekspresikan pendapat dan aktualisasi diri, kebutuhan berprestasi.
3. Kebutuhan sosial. Kebutuhan manusia dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Kebutuhan untuk berkelompok, bermasyarakat, berorganisasi, berelasi, dan berinteraksi, berkawan, dan bersahabat dengan orang lain, berpartisipasi, berintegrasi, dan kebutuhan akan pengakuan status sosial.

4. Kebutuhan spiritual. Kebutuhan rohani manusia dalam kaitannya dengan aspek-aspek transendensial diluar dirinya. Kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sang pencipta, kebutuhan untuk beragama dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.
5. Kebutuhan ekonomi. Kebutuhan untuk memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan yang berupa uang atau materi.
6. Kebutuhan pendidikan. Kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.
7. Kebutuhan keadilan. kebutuhan akan ketentraman, perlindungan, dan kesamaan dengan orang lain, termasuk kebutuhan akan suasana demokratis dan kesempatan yang sama dalam mencapai cita-cita.

Berdasarkan jenis kebutuhan di atas bahwa kebutuhan manusia dimulai dari titik yang rendah hingga titik yang tertinggi untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang paling tinggi karena kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan yang sangat kompleks seperti sandng, pangan, dan papan.

2.6. Kelompok Wanita Tani

2.6.1. Konsep Kelompok Wanita Tani

Sobriyan (2018) menyatakan bahwa “Kelompok Tani adalah bagian dari organisasi petani yang berfungsi sebagai perantara untuk membawa perbaikan dalam praktik pertanian dengan tujuan membuat praktik tersebut lebih terarah dan efisien”. “Praktek pertanian yang paling intensif berpotensi meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani dan keluarga yang mereka dukung dengan mengarah ke tingkat produktivitas pertanian yang lebih tinggi, yang pada gilirannya mengarah pada tingkat pendapatan yang lebih tinggi bagi petani”

(BPLPP 1990). Kelompok tani adalah kelompok petani yang terikat secara informal yang terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, dan sumber daya), dan kekeluargaan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. Kelompok Wanita Tani yang sering dikenal dengan singkatan KWT adalah kelompok swadaya berbasis masyarakat yang dibentuk dari dalam masyarakat, untuk masyarakat, dan oleh masyarakat. Ukuran optimal untuk sebuah kelompok adalah antara 20 dan 30 orang, tetapi jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada keadaan dan wilayah kerja kelompok selama tidak melebihi batas resmi desa. Bersamaan dengan memberikan kontribusi keuangan untuk keluarga mereka, pasangan dari pekerja pertanian telah bersatu untuk membentuk sebuah kelompok yang dikenal sebagai kelompok wanita tani.

“Salah satu komponen terpenting dari sektor pertanian adalah partisipasi perempuan dalam semua aspek kegiatan industri, termasuk pekerjaan manual, budidaya tanaman, pengolahan makanan, dan perawatan pasca panen barang-barang pertanian”. (Yuwono, dalam Sobriyan 2018). Hal ini didukung oleh data yang dikumpulkan oleh BPS antara tahun 1990 dan 2006, yang menunjukkan bahwa lebih dari setengah jumlah penduduk Indonesia adalah perempuan. Selain itu, lebih dari 70 persen penduduk Indonesia (atau sekitar 82,6 juta jiwa) tinggal di daerah pedesaan, dan 55 persen dari penduduk tersebut bermatapencaharian dari pertanian. Karena perseteruan perempuan di sektor pertanian dianggap sebagai sesuatu yang wajar, keterlibatan mereka di sektor pertanian sebagai tenaga kerja mengakibatkan perempuan memiliki peran ganda, yaitu peran sebagai ibu

rumah tangga dan peran di sektor publik untuk mencari nafkah untuk membantu, menopang pendapatan keluarga. Hal ini mengakibatkan perempuan memiliki peran ganda karena keterlibatan mereka di sektor pertanian sebagai tenaga kerja mengakibatkan perempuan memiliki peran ganda. Mengingat bahwa bertani memberikan penghasilan bagi sebagian besar penduduk pedesaan, mayoritas istri yang bekerja di luar rumah untuk menghidupi keluarganya melakukannya di sektor pertanian.

Membantu suami dalam mencari nafkah, dengan harapan akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi bagi keluarga secara keseluruhan, merupakan pendorong bagi sebagian besar perempuan yang bekerja di bidang pertanian. Mayoritas perempuan tani adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki sumber pendapatan lain selain bertani, yang merupakan faktor lain yang turut mendorong dorongan untuk membantu mencari nafkah. Selain itu, beberapa dari mereka percaya bahwa mereka memiliki pengaruh yang signifikan terhadap waktu panen jika mereka sendiri terlibat dalam kegiatan pertanian. Tingkat motivasi seseorang merupakan sifat bawaan yang mungkin berpengaruh pada proses pengambilan keputusan.

2.6.2. Peran Kelompok Wanita Tani

Sobriyan (2018) berpendapat bahwa dalam “hubungan sosial, dua komponen penting adalah peran dan posisi seseorang”. Tindakan individu yang signifikan terhadap struktur sosial disebut sebagai peran. Pada gilirannya, struktur sosial akan memberikan fasilitas khusus kepada individu berdasarkan posisi mereka. Dalam bentuknya yang paling mendasar, dimulai dengan pemeriksaan

komposisi keluarga, atau struktur keluarga, karena keluarga adalah bangunan dasar masyarakat dan kekerabatan (*skinship*).

Program Kelompok Wanita Tani (KWT), juga disebut sebagai KWT, adalah salah satu inisiatif pemerintah yang dirancang untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan sosial petani. “KWT didirikan dengan tujuan untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kemampuan petani dan keluarganya sebagai subyek pembangunan pertanian melalui pendekatan kelompok agar dapat berperan lebih nyata dalam pembangunan” (BPLPP 1990). Keikutsertaan mereka dalam kegiatan pertanian, perikanan, dan peternakan sebenarnya memberikan dukungan untuk mempertahankan rumah tangga mereka melalui kegiatan seperti ini, dan peran anggota KWT dalam proses kegiatan (ekonomi) memiliki kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga bagi perempuan dan rumah tangga yang tidak dalam posisi keuangan yang baik. Anggota KWT dapat memperoleh manfaat dari memperluas pengetahuan mereka di bidang-bidang seperti pertanian, perikanan, dan peternakan, selain keuntungan ekonomi yang diberikan organisasi. Mereka dipaksa untuk berusaha memenuhi kebutuhan sehari-hari meskipun memiliki pendapatan rumah tangga yang tidak menentu. Peningkatan kesejahteraan keluarga anggota KWT didukung oleh faktor-faktor antara lain kerjasama yang baik dengan seluruh anggota KWT, bantuan dari instansi terkait, dan dukungan dari semua pihak yang mendukung operasional di lingkungan KWT. Perempuan petani di pedesaan secara tidak langsung melayani tujuan perempuan yang mandiri secara ekonomi. Sebab perempuan merasa berkewajiban untuk memenuhi peran mereka sebagai anggota rumah tangga yang

bertanggung jawab dan bekerja keras untuk melakukannya serta perempuan memainkan peran penting dalam pertanian, tidak hanya pada tahap produksi tetapi juga pada tahap pasca panen dan pemasaran, melayani kebutuhan pasar dan mereka sendiri.

2.7. Konsep Kemiskinan

Salah satu bentuk masalah sosial ialah kemiskinan. Kemiskinan senantiasa hadir ditengah-tengah masyarakat, khususnya di negara berkembang. Suharto (2014: 134) yang dikutip dari BPS dan Depsos (2003:3) mendefinisikan kemiskinan sebagai “ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak”. Dari definisi tersenut dapat dijelaskan kembali kemiskinan adalah sebuah kondisi di mana individu tidak mampu untuk hidup layak dikarenakan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar minimal seperti sandang, pangan dan papan yang dapat diartikan serba kekurangan.

Kemiskinan pada umumnya kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemiskinan bahkan menjadi sebuah sumber dari segala bentuk permasalahan sosial lainnya yang muncul dan berkembang dalam sebuah masyarakat atau sebuah Negara.

Kemiskinan pada umumnya kerap didefinisikan sebagai kondisi yang ditandai oleh serba kekurangan: kekurangan pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk dan kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemiskinan bahkan menjadi sebuah sumber dari segala bentuk permasalahan sosial lainnya yang muncul dan berkembang dalam sebuah masyarakat atau sebuah Negara.

2.7.1 Faktor Kemiskinan

Kemiskinan terjadi karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal seorang individu. Kemiskinan seakan menjadi musuh abadi sebuah bangsa dan menjadi tanggung jawab bangsa dalam mneyelenggarakan usaha-usaha yang bertujuan untuk mengentaskan masalah sosial kemiskinan Menurut Hikmat (2005) dalam Hafisah (2008:32) mengemukakan bahwa faktor penyebab kemiskinan dapat dikategorikan ke dalam dua hal, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor internal

Faktor-faktor internal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa kurang mampuan dalam hal:

- a) Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan)
- b) Intelektual (kurangnya pengetahuan, kekurangan informasi)
- c) Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, temperamental)
- d) Spiritual (misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin)
- e) Sosial psikologis (kurang motivasi, kurang percaya diri, kurang relasi, depresi, kurang mampu mencari dukungan)
- f) Keterampilan (tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan pekerjaan)
- g) Asset (tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja).

2. Faktor eksternal

Faktor-faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain:

- a) Terbatasnya pelayanan sosial dasar
- b) Tidak dilindungi hak atas kepemilikan tanah
- c) Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal
- d) Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
- e) Belum terciptanya system ekonomi kerakyatan dengan prioritas sector riil masyarakat banyak.
- f) Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal (seperti zakat)
- g) Dampak sosial negatif dan program penyesuaian structural

- h) Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan
- i) Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana
- j) Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
- k) Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata
- l) Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

Dengan demikian, faktor internal dan eksternal tersebut mengakibatkan kondisi keluarga prasejahtera yang menjadikan tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, gagal fungsi sosialnya serta terganggunya dalam melaksanakan peranan sosialnya sebagai individu dalam anggota masyarakat.